PENGARUH JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Tahun 2010-2014)

THE INFLUENCE THE NUMBER OF TAXABLE EMPLOYERS AND TAX COLLECTION OF THE VALUE ADDED TAX RECEIPTS
(Case Study of Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Period 2010-2014)

Oleh:
Imas Masruroh
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
Email: Imasmasrurohh@gmail.com

ABSTRACT

The phenomenon that occurs in this study for the years 2011-2014 there was an increase in the Number of taxable Employers KPP Pratama Majalaya but development value added tax receipts that is produced is decreased. The next phenomenon that occurs in 2011-2012 where an increase in tax collection.

The purpose of this study was to determine how much influence the Number of taxable Employers on development value added tax receipts, and tax collection on development value added tax receipts. This study in Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya 2010-2014.

The method used is linear regression, Researchers also tested whether there are deviations from the assumption of normality test, autocorrelation, multicollinearity, and heteroscedasticity.The results showed that there is a effect partially between the number of taxable Employers on the value added tax receipts. And there is a effect between on tax collection with forced letter on the value added tax receipts.

Keywords: the taxable Employers, tax collection, the value added tax receipts

I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perekonomian di Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan dibidang pajak.Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat (Waluyo 2013:3). Sektor pajak memiliki posisi sangat penting dan strategis bagi pendapatan negara, sehingga hampir tidak dapat disangkal bahwa pajak merupakan andalan pemasukan uang bagi negara (Siti Kurnia Rahayu: 2013). Penerimaan perpajakan dalam APBN adalah sumber penerimaan terbesar negara dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sumber pajak terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (Mardiasmo: 2008).

Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang mengalami pertambahan nilai. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa tanah, upah kerja dan laba perusahaan adalah merupakan unsur nilai tambah. Jadi nilai tambah dapat diperoleh dalam kegiatan industri maupun perdagangan, bukan diperoleh dari perubahan bentuk atau sifat barang (Siti Kurnia Rahayu&Ely Suhayati: 2010). Pajak Pertambahan Nilai memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak. Kontribusi ini juga meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya target penerimaan

pajak secara keseluruhan. Pihak yang wajib menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak, dan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (Arif Nurrokhman: 2012).

Pengusaha Kena Pajak yaitu orang atau badan bertanggung jawab untuk melakukan kewajiban pajak, antara lain memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang (Haula Rosdiana 2011:206). Kewajiban seorang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu memungut PPN ini diimplementasikan dalam wujud PKP wajib membuat faktur pajak atas setiap kegiatan penyerahan BKP/JKP di dalam Daerah Pabean, menyetorkan hasil penghitungannya tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang dalam suatu saat atau masa pajak,Pengusaha Kena Pajak(PKP) menyetorkan pajak yang terutang dan yang terakhir melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diwujudkan dengan pemenuhan kewajiban penyampaian SPT Masa PPN (Siti Kurnia Rahayu: 2013).

Pengusaha Kena Pajak (PKP) menjadi pemungut (*tax collector*) dan akan memungut pajak dari konsumennya atas penyerahan barang dan /jasa (*taxable supply*). Dalam transaksi yang terutang pajak, PKP yang akan menanggung pajak yang terutang namun karena PPN merupakan pajak tidak langsung (*indirect tax*), maka beban pajaknya dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau konsumen (Haula Rosdiana dkk 2011).

PPN dipungut berdasarkan *Self Assessment System*, Untuk mencapai target pajak *Self Assessment system* dalam prakteknya sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak (Ritonga: 2012). Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin meningkat. Peningkatan jumlah tunggakan pajak tersebut harusnya juga diimbangi dengan kegiatan pencariannya. Untuk itu perlu tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa untuk peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak (Waluyo 2013:89).

Pemerintah akhirnya memberlakukan UU No 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan sejak 1 Januari 2001 penagihan pajak dilaksanakan dengan UU No 19 tahun 2000 (Ritonga: 2012). Dimana tindakan penagihan dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Marduati :2012).

Urutan urutan penagihan pajak dilakukan/ dilanjutkan jika penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya. Dengan demikian , jika utang pajak telah dilunasi , maka serangkaian tindakan tersebut tidak perlu dilanjutkan. Dengan demikian ,serangkaian tindakan tersebut bisa jadi hanya sampai surat teguran, seandainya setelah surat teguran diterbitkan dan diterima penanggung pajak, utang pajak dilunasinya (Ida Zuraida & L.Y Hari Sih Advianto 2011).

Adapun kesenjangan penelitian atau *research gap* pada jumlah pengusaha kena pajak dan penagihan pajak pengaruhnya terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai melalui penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh saepudin (2008), Zulia Hanum (2012), dan Arif Nurrokhman (2013) menunjukkan bahwa jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh positif terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu hasil penelitian terdahulu dari Putu Putra Mahendra&I Made Sukartha (2014), Restika,Sri & Amirudin Jauhari (2015),Ida Ayu Ivon Trisnayanti & I Ketut Jati(2015), dan Gilang Destriyatna, Nengah Sudjana & Dwiatmanto (2014) menunjukkan bahwa Penagihan Pajak berpengaruh Positif terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan uraian – uraian diatas serta penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, Maka penulis mengkaji ulang terkait Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Penagihan pajak terkait surat paksa serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan memilih judul **"Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)"** (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya Tahun 2010-2014).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Seberapa besar pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2) Seberapa besar pengaruh Penagihan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.3 Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh serta mengumpulkan data dan informasi atas beberapa pengaruh jumlah pengusaha kena pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

1.4 Tujuan Penelitian

1) Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2) Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.5 Kegunaan Penelitian

1) Bagi Perusahaan
   Sebagai bahan masukan bagi perusahaan dalam meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2) Bagi Akademik
   Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk memperluas wawasan maupun sebagai acuan bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Pengaruh jumlah pengusaha Kena Pajak dan Penagihan Pajak terhadap penerimaan PPN
3) Bagi Penulis
   Dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas tentang obyek yang diteliti khususnya mengenai jumlah pengusaha kena pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

1) Pengusaha Kena Pajak

Definisi Pengusaha Kena Pajak dijelaskan oleh Siti Resmi (2012) menyatakan bahwa:“Pengusaha kena pajak (pkp) adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang , mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukann usaha jasa, atau memanfaatkan jasa diluar daerah pabean yang melakukan penyerahan BKP dan penyerahan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ppn dan PPNBM, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak”.

2) Pengihan Pajak

Definisi Penagihan Pajak dijelaskan oleh Ida Zuraida & L.Y. Hari Sih Advianto (2011: 37) menyatakan bahwa: “Penagihan Pajak adalah Serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.

Menurut Ida Zuraida &L.Y. Hari sih Advianto (2011:71) mengatakan bahwa Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak atau Surat yang diterbitkan untuk memerintahkan dengan paksa kepada penanggung pajak untuk melunasi utang pajak beserta biaya penagihan

3) Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Utomo dkk (2011) menyatakan bahwa **"**Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Jadi dapat dikatakan bahwa pajak pertambahan nilai adalah pajak yang pengenaannya berkaitan dengan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh konsumen dan produsen".

2.2 Kerangka Pemikiran

a) Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Dwi Sunar Prasetyono (2012: 134) Menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan jumlah pajak yang telah dibuatkan faktur pajak ke kas negara atau masuk sebagai Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Menurut Untung Sukardji (2005:54) semakin banyak pengusaha yang mengukuhkan menjadi pengusaha kena pajak maka penyerahan JKP dan BKP akan semakin banyak dan bisa jadi peluang bertambahnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut Haula rosdiana dkk (2011:267) menyatakan bahwa Ketidapatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap ketentuan mengenai saat terutangnya pajak tersebut dapat merugikan penerimaan negara dalam arti kas negara terlambat menerima pajak yang bersangkutan. Menurut Zulia Hanum (2012) mengatakan bahwa pihak ketiga yang berhak memungut Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak yang nantinya tersebut akan disetorkan ke kas negara.

b) Pengaruh Penagihan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Restika Purnawardhani dkk (2015) Tindakan penagihan pajak, terutama tindakan penagihan pajak aktif, diharapkan agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak agar melunasi utang pajak, sehingga optimalisasi penerimaan pajak dapat tercapai.

Menurut Soemarso S.R (2007) d menyatakan bahwa Penagihan pajak yang merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak oleh pihak fiskus agar dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Menurut Ida Zuraida dan Hari Sih Advianto (2011:38) menyatakan bahwa salasatu fungsi penagihan pajak sebagai tindakan pengamanan penerimaan pajak. Apabila banyak utang pajak yang tidak tertagih maka akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Oleh karna itu tindakan Penagihan Pajak harus dilakukan efektif dan efisien untuk menjaga keamanan penerimaan pajak.

III. METODOLOGI PEMELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif akan kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

3.2 Operasional Variabel

1) Variabel Bebas (*Independent Variable*)
   Menurut Sugiyono (2012: 39) Variabel independen dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini variabel bebas yang akan diteliti adalah variabel X_1: Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan variabel X_2: Penagihan Pajak.
2) Menurut Sugiyono (2012:39) Variabel dependen dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikat yang akan diteliti adalah variabel Y: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara . Data yang dibutuhkan langsung dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya pada periode 2010-2014.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan), survei berdasarkan pengalaman dan/atau studi kasus dimana peneliti berusaha mengidentifikasi variabel-variabel penting dan hubungan antar variabel tersebut dalam situasi permasalahan tertentu serta studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku di perpustakaan, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti oleh penulis, seperti studi kepustakaan melalui jurnal, *textbook*, karya tulis yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.4 Populasi, Sample dan Tempat Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah Pengusaha Kena Pajak,jumlah Surat paksa pajak dan laporan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta target penerimaan selama 5 tahun terakhir pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya selama periode 2010-2014.

Menurut sugiyono (2012:85) Sampling jenuh adalah teknik teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relative kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat genelaisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Sampel dalam penelitian ini adalah jumlah Pegusaha Kena Pajak, Nominal surat paksa dan laporan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya selama periode 2010-2014.

Penulis dapat memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dengan cara mengadakan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya yang beralamat di Jl. Peta No.7 Suka Asih, Bojongloa Kaler, Kota Bandung. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada Bulan Januari 2016 sampai dengan Juli 2016.

3.5 Metode Analisis Data

Peneliti melakukan analisa terhadap data yang telah diuraikan dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik, uji korelasi, dan uji koefisien diterminasi.

a) Analisis Regresi Linier Berganda

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Pengusaha Kena Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan PPN bentuk persamaan dari regresi linier berganda ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Sumber: Sugiyono (2012: 192)

Dimana:

- Y = Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
- X_1 = Pengusaha Kena pajak
- X_2 = Penagihan Pajak
- α = Konstanta Intersep
- β_1 = Koefisien Regresi Variabel Jumlah Pengusaha Kena Pajak β_2 = Koefisien Regresi Variabel Penagihan Pajak
- ε = Tingkat Kesalahan (*error term*)

Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat pada analisis regresi berganda maka dilakukan pengujian asumsi klasik agar hasil yang diperoleh merupakan persamaan regresi yang memiliki sifat *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE). Beberapa asumsi klasik yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebagai alat untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel yang diteliti, terdiri atas:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak.

2) Uji Multikolinieritas

Menurut Imam Ghozali (2006: 95) bahwa uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.

3) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Husein Umar (2011: 179) mendefinisikan uji heteroskedastisitas sebagai berikut:

"Heteroskedastisitas adalah dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain."

4) Uji Autokorelasi

Menurut Husein Umar (2011: 182) mendefinisikan uji autokorelasi sebagai berikut:

"Autokorelasi adalah dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antar data yang ada pada variabel-variabel penelitian."

b) Analisis Korelasi

Analisis korelasi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui arah dan kuatnya hubungan antar variabel. Arah dinyatakan dalam positif dan negatif, sedangkan kuat atau lemahnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi.

c) Analisis Determinasi

Analisis Koefisiensi Determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa besar variable independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase. Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Sumber: Ridwan dan Sunarto (2009: 81)

Keterangan:

Kd = Koefisien Determinasi

r^2 = Koefisien Korelasi

5.6 Pengujian Hipotesis

Sugiyono (2010: 159) mendefinisikan hipotesis sebagai berikut:

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan."

a) Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji Statistik t)

H_0 : β = 0 : Pengusaha Kena pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN.

Ha_1: $\beta_1 \neq 0$: Pengusaha Kena pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN.

H_0 : β = 0 : Penagihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN.

Ha_2: $\beta_2 \neq 0$: Penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN.

Tingkat signifikan 5% dari derajat bebas (df) = n – k, untuk menentukan t_{tabel} sebagai batas daerah penerimaan dan penolakan hipotesis. Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05 atau 5% karena dinilai cukup untuk mewakili hubungan variabel-variabel yang diteliti dan merupakan tingkat signifikasi yang umum digunakan dalam statu penelitian.

b) Menggambar Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis

Penggambaran daerah penerimaan atau penolakan hipotesis beserta kriteriaakan dijelaskan sebagai berikut:

Hasil t_{hitung} dibandingkan dengan t_{tabel} dengan kriteria:

(a) Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_0 ada di daerah penolakan, hal ini diartikan Ha diterima dan artinya antara variabel X dan variabel Y memiliki pengaruh.

(b) Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 ada di daerah penerimaan, hal ini diartikan Ha ditolak dan artinya antara variabel X dan variabel Y tidak memiliki pengaruh.

(c) t_{hitung} dicari dengan rumus perhitungan t_{hitung}.

(d) t_{tabel} dicari didalam tabel distribusi nilai t_{tabel} dengan ketentuan tingkat signifikan 5% ($\alpha = 0,05$) dan df = (n – k) atau 42 – 3 = 39.

c) Penarikan Kesimpulan

Jika thitung jatuh di daerah penolakan (penerimaan), maka H0 ditolak (diterima) dan Ha diterima (ditolak). Artinya koefisian regresi signifikan (tidak signifikan). Kesimpulannya, kebijakan dividen dan rasio leverage berpengaruh (tidak berpengaruh) terhadap nilai perusahaan. Tingkat signifikannya yaitu 5% ($\alpha = 0,05$), artinya jika hipotesis nol ditolak (diterima) dengan taraf kepercayaan 95%, maka kemungkinan bahwa hasil dari penarikan kesimpulan mempunyai kebenaran 95% dan hal ini menunjukan adanya (tidak adanya) pengaruh yang meyakinkan (signifikan) antara dua variabel tersebut.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Verifikatif

1) Hasil Uji Normalitas

Dari hasil uji normalitas menggunakan tes *Kolmogorov-Smirnov*, nilai probabilitas yang diperoleh dari nilai *Asymp Sig*. adalah sebesar 0.200 dan nilai tersebut lebih besar dari 0.05, maka sesuai dengan kriteria pengujian dapat disimpulkan bahwa residual dalam model regresi berdistribusi secara normal, sehingga model telah memenuhi salah satu syarat untuk dilakukan pengujian regresi

2) Hasil Uji Multikolinieritas

Berdasarkan nilai VIF yang diperoleh, menunjukkan tidak ada korelasi yang cukup kuat antara sesama variabel bebas. Hal tersebut dapat dilihat dari besaran tolerance (α) dan variance inflation factor (VIF) jika menggunakan alpha/tolerance = 10% atau 0,10 maka VIF = 10. Hasil output VIF dari kedua variabel yaitu sebesar 1.245 lebih kecil dari 10 dan semua tolerance variabel bebas memiliki nilai sebesar 0.797 = 79,7% lebih besar dari 10%, maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas.

3) Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan pola pada grafik *scatterplot*, titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi penerimaan PPN berdasarkan Jumlah PKP dan Penagihan Pajak.

4) Hasil Uji Autokorelasi

Nilai statistik Durbin-Watson (D-W) sebesar 1,682. Sementara dari Tabel D-W dengan tingkat signifikan ($\alpha = 5\%$), untuk jumlah variabel bebas sebanyak 2 variabel (k = 2), dan jumlah pengamatan pada penelitian sebanyak 60 sampel (n = 60), maka diperoleh nilai batas bawah (dL) sebesar 1.5144 dan batas atas (dU) sebesar 1.6518. Karena nilai Durbin-Watson model regresi pada hasil pengolahan sebesar 1,682 dan lebih besar dari batas atas (dU) 1.6518 serta kurang dari 4 – 1.6518 (4 – dU), maka disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat autokorelasi.

5) Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil koefisien regresi yang diperoleh dapat ditulis dalam bentuk persamaan yang menggambarkan hubungan data X dan Y yang digunakan sebagai berikut.

$$Y = (-5,012) + 0,137\ X_1 + 6,525\ X_2$$

Persamaan regresi linier berganda di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut.

a) Nilai konstanta sebesar 21.798, menunjukan besarnya penerimaan pajak pertambahan nilai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pratama Majalaya, jika pengusaha kena pajak dan penagihan pajak bernilai 0.

b) Koefisien regresi untuk jumlah pengusaha kena pajak sebesar 0.002 X_1 dan bertanda positif, artinya setiap terjadi peningkatan 1 satuan pada pengusaha kena pajak bernilai konstan, diprediksikan mampu meningkatkan penerimaan PPN di KPP Majalaya sebesar 0,002.

c) Koefisien regresi untuk Penagihan pajak sebesar -0,028 X_2 dan bertanda negatif, artinya setiap terjadi peningkatan 1 satuan pada Penagihan Pajak bernilai konstan, diprediksikan mampu menurunkan penerimaan PPN di KPP Majalaya sebesar 0,028.

6) Koefisien korelasi

a) Koefisien Korelasi jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Nilai korelasi parsial antara jumlah pengusaha kena pajak dengan penerimaan pajak pertambahan nilai adalah sebesar 0,634 dan termasuk dalam kategori hubungan yang kuat berada pada interval korelasi antara "0,60-0,799". Nilai korelasi bertanda positif yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah, artinya semakin banyak jumlah pengusaha kena pajak, maka semakin tinggi pula penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang di dapat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya. Berdasarkan nilai korelasi yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat hubungan positif yang cukup kuat antara jumlah pengusaha kena pajak dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

b) Koefisien Korelasi Parsial antara Penagihan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Nilai korelasi parsial antara Penagihan pajak dengan penerimaan pajak peertambahan nilai (PPN) adalah sebesar -0,387 dan termasuk dalam kategori hubungan yang rendah berada pada interval korelasi antara "0,20-0,399". Nilai korelasi bertanda negatif yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah berlawanan, artinya semakin tinggi penagihan pajak atas Surat Paksa, maka semakin rendah penerimaan pajak pertambahan nilai. Berdasarkan nilai korelasi yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat hubungan negatif yang sangat rendah penagihan pajak dengan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).

7) Koefisien Determinasi

Dari *output SPSS*, diperoleh nilai koefisien determinasi parsial dari variabel kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan sebagai berikut.

Kd = $(0{,}769)2 \times 100\%$
= 59,1%

Perhitungan di atas, artinya pengaruh jumlah pengusaha kena pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai sebesar 59,1% Sedangkan sisanya 40,9% sisanya merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti baik dari internal maupun eksternal.

8) Uji Hipotesis

Dari *output SPSS*, t_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar 6,187. Mengacu pada tabel distribusi *t* dengan α = 5% dan *df* (60-2-1) = 57 untuk pengujian 2 pihak diperoleh nilai t_{tabel} sebesar ± 1.672. Nilai t_{hitung} berada di daerah penolakanH_0 (t_{hitung} (6,187) > t_{tabel} (1.672)) sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah menolak Ho dan menerima H_1 yang berarti jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Dari *output SPSS*, Nilai t_{hitung} yang diperoleh untuk variabel Penagihan Pajak adalah sebesar -3,167Mengacu pada tabel distribusi *t* dengan α = 5% dan *df* (60-2-1) = 57 untuk pengujian 2 pihak diperoleh nilai t_{tabel} sebesar ± 1.672. Nilai t_{hitung} berada di daerah penolakanH_0 (t_{hitung} (-3.167) > t_{tabel} (-1.672)) sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah menolak Ho dan menerima H_1 yang berarti Penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pembahasan

1) Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah pengusaha kena pajak dengan penerimaan pajak pertambahan nilai adalah sebesar 0,634 dan termasuk dalam kategori hubungan yang kuat berada pada interval korelasi antara "0,60-0,799". Nilai korelasi bertanda positif yang menunjukan

bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah, artinya semakin banyak jumlah pengusaha kena pajak, maka semakin tinggi pula penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang di dapat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya. Berdasarkan nilai korelasi yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat hubungan positif yang cukup kuat antara jumlah pengusaha kena pajak dengan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini terjadi dikarenakan pengusaha kena pajak merupakan orang ketiga yang berhak memungut pajak pertambahan nilai (Haula Rosdiana 2011:206).

Dengan bertambahnya jumlah PKP yang terdaftar maka akan menambah potensi penyerahan barang dan jasa kena pajak. Sehingga akan menambah penerimaan PPN. Jumlah pengusaha kena pajak (PKP) memberikan pengaruh sebesar 42,2% terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sedangkan sisanya sebesar 57,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain misalnya faktor ekonomi dan faktor pertumbuhan penduduk atau angka kelahiran.

Selanjutnya hasil pengujian hipotesis uji t yang diperoleh menunjukkan bahwa H_0 ditolak dikarenakan hasil uji t_{hitung} lebih besar dibandingkan dengan t_{tabel}. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa jumlah pengusaha kena pajak memiliki pengaruh secara parsial terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya.

2) Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Hasil penelitian menunjukan bahwa Penagihan pajak dengan penerimaan pajak peertambahan nilai (PPN) adalah sebesar -0,387 dan termasuk dalam kategori hubungan yang rendah berada pada interval korelasi antara “0,20-0,399”. Nilai korelasi bertanda negatif yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah berlawanan, artinya semakin tinggi penagihan pajak atas surat paksa, maka semakin rendah penerimaan pajak pertambahan nilai dikarenakan wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak sehingga menjadi utang pajak dapat mengurangi penerimaan pajak pertambahan nilai (Ida Zuraida & L.Y Hari Sih Advianto 2011:38). Berdasarkan nilai korelasi yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat hubungan negatif yang rendah penagihan pajak dengan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).

Penagihan Pajak memberikan pengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 16,9%, sedangkan sisanya sebesar 83,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain misalnya penagihan pajak dengan surat teguran, tidak tersampaikanya surat paksa ke penanggung pajak dll.

Hasil pengujian hipotesis antara penagihan pajak dan penerimaan pajak pertambahan nilai, terlihat Bahwa nilai t_{hitung} berada di daerah penolakan H_0 (t_{hitung} (-3.167) > t_{tabel} (-1.672)) sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah adalah menolak Ho dan menerima H_1 yang berarti Penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya.

Hasil penelitian yang dijabarkan oleh Harijanto Sabijono (2014:10) beberapa alasan Surat paksa tidak bisa diterbitkan atau disampaikan kepada penanggung pajak karena penanggung pajak pindah alamat dan tidak melaporkan ke kantor pajak, kurangnya kesadaran penanggung pajak untuk membayar tunggakan pajak yang ditagih dengan surat paksa, kurangnya peran aktif juru sita pajak dalam memberitahukan tunggakan pajak lewat surat paksa.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1) Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya pada periode 2010-2014, dimana setiap ada kenaikan dalam jumlah pengusaha kena pajak maka akan terjadi peningkatan pula pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan bertambahnya jumlah PKP yang terdaftar maka akan menambah potensi penyerahan barang dan jasa kena pajak. Sehingga akan menambah pengaruh terhadap PPN

2) Penagihan Pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya pada periode 2010-2014, baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam surat paksa dimana semakin tinggi penagihan pajak atas Surat Paksa, maka semakin rendah penerimaan pajak pertambahan nilai. Sehingga hal itu dapat mempengaruhi tingkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

5.2 Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh jumlah pengusaha kena pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai,maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Majalaya :

5.2.1 Saran Operasional

a) Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya yang memiliki penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) yang rendah dikarenakan jumlah pengusaha kena pajak yang rendah pula, sebaiknya untuk mengatasi hal tersebut dengan cara mensosialisasikan kepada para pengusaha yang sudah memenuhi kriteria pengusaha kena pajak yang tertulis di Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang batasan pengusaha kecil dan untuk segera mengukuhkan agar menjadi pengusaha Kena Pajak.

b) Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang memiliki tunggakan yang besar sebaiknya dilakukan pencairan tunggakan pajak yaitu dengan cara melakukan penagihan pajak dengan menerbitkan surat paksa untuk meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tunggakan pajak atau utang pajak terjadi karena penanggung pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran tidak melunasi kewajiban nya untuk membayar pajak sehingga perlu dilakukan penagihan pajak untuk mengurangi tunggakan pajak dan bisa menjadi salasatu sumber penerimaan pajak pertambahan Nilai (PPN).

5.2.2 Saran Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, sebagai sumber informasi dan sebagai sumbangan pemikiran dalam mengembangkan disiplin ilmu pajak, serta kontribusi dalam pengembangan penelitian khususnya mengenai pengusaha kena pajak, penagihan pajak dan pajak pertambahan nilai serta sebagai masukan dan tambahan referensi bagi para pembaca. Disarankan pada penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan metode yang sama tetapi dengan variabel. Unit analis dan sample yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep diterima secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Supangat. 2010. *Statistika: dalam kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik*. Jakarta: Prenada Media Group.

Dinar Sunar Prasetyono. 2011. *Buku Pintar Pajak.* Jakarta: Laksana.

Haula Rosdiana dan Edi slamet irianto. 2011. *Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Visimedia.

Herry Purwono. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.

Husein Umar. 2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ida Zuraida dan Hari Sih Advianto. 2011. *Penagihan Pajak.* Bogor. Ghalia Indonesia

Imam Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi 5*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset

Siti Kurnia Rahayu. 2013*. Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Soemarso, S.R, 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat,

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2011. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Moxed Methods*). Bandung: CV Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Umi Narimawati dkk. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Bekasi: Genesis.

Umi Narimawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media.

Untung Sukardji. 2005. *Pokok-pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Utomo dkk. 2011. *Perpajakan: Aplikasi dan Terapan.* Yogyakarta: Andi

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Jurnal:

Arif Nurrokhman. 2013. *Analisis Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari*. Universitas Dian Nuswantoro.

Dwi Nuraeni. 2011. *Pengaruh Inflasi,Nilai Tukar Rupiah dan jumlah pengusaha kena pajak (PKP) terhadap penerimaan pajak pertambahan Nilai*. Jakarta. Universitas Islam Negeri Arif Hidayatullah.

Ginting, R. 2006. *Pengaruh Pemberian Surat Penagihan Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak Penghasilan di Tiga Kantor Pelayanan Pajak*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. (1):11-20.

Hazra Muda dkk. 2015. *Penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dampaknya terhadap penerimaan pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Bitung.* ISSN 2303-1174. Jurnal EMBA Vol.3 No.4 Desember 2015, Hal. 1-12.

Ida Ayu Ivon Trisnayanti & I Ketut Jati. 2015. *Pengaruh Self Assesment System, Pemeriksaan Pajak pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN*). Bali. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 13.1ISSN: 2302-8556.

Mahendra, Putu Putra dan I Made Sukartha. 2014. *Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol9 (3).

Marduati, Andi. 2012. *Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama* Makassar Barat. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan BisnisUniversitas Hasanuddin. Makassar.

Muhamad Riski Nindar dkk. 2015. *Efektivitas Penagihan Pajak dengan surat paksa dan surat teguran terhadap penerimaan pajak Pertambahan Nilai pada kantor pelayanan pajak pratama Manado*. ISSN 2303-1174 . Jurnal EMBA Vol.2 No.1 Maret 2014, Hal. 1-10

Ritonga, Pandapotan. 2012. *Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama* Medan Timur. Jurnal Saintikom. Vol. 11(3). Hal: 217.

Saepudin. 2008. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Sumatera Utara*. Tesis Pascasarjana Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

Zulia Hanum. 2012. *Pengaruh Witholding Tax System Pada Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama* Medan. ISSN: 1693-7600.

Operasional Variabel

VARIABEL	KONSEP	INDIKATOR	SKALA
Jumlah Pengusaha Kena Pajak (X1)	Pengusaha Kena Pajak yaitu jumlah orang atau badan yang bertanggung jawab untuk melakukan kewajiban pajak, antara lain memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. (Haula Rosdiana 2011:206)	Jumlah pengusaha kena pajak yang terdaftar (Haula Rosdiana 2011:221).	RASIO
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (X2)	Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. (Ida Zuraida &L.Y. Hari sih Advianto 2011:37) Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak atau Surat yang diterbitkan untuk memerintahkan dengan paksa kepada penanggung pajak untuk melunasi utang pajak beserta biaya penagihan. (Ida Zuraida &L.Y. Hari sih Advianto 2011:71)	Jumlah nominal Penagihan Pajak dengan surat paksa yang diterbitkan (Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto 2011: 72)	RASIO
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Y)	Penerimaan pajak pertambahan nilai adalah penrimaan yang diterima dari seluruh pembayaran PPN oleh wajib pajak yang disetorkan ke kantor pelayanan pajak (KPP).	Jumlah penerimaan PPN (Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati 2010:231)	RASIO

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,41549510
Most Extreme Differences	Absolute	,098
	Positive	,098
	Negative	-,096
Test Statistic		,098
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200[c,d]

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Jumlah PKP	,797	1,254
	Surat Paksa	,797	1,254

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jumlah PKP	60	270,00	836,00	471,3000	168,17689
Valid N (listwise)	60				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Surat Paksa	60	,00	233511778,00	8405841,4333	38812042,45103
Valid N (listwise)	60				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerimaan PPN	60	1008822668	33156523107	9082231600,5167	6091819222,96775
Valid N (listwise)	60				

Correlations

Control Variables			Jumlah PKP	Penerimaan PPN
Surat Paksa	Jumlah PKP	Correlation	1,000	,634
		Significance (2-tailed)	.	,000
		df	0	57
	Penerimaan PPN	Correlation	,634	1,000
		Significance (2-tailed)	,000	.
		df	57	0

Correlations

Control Variables			Surat Paksa	Penerimaan PPN
Jumlah PKP	Surat Paksa	Correlation	1,000	-,387
		Significance (2-tailed)	.	,002
		df	0	57
	Penerimaan PPN	Correlation	-,387	1,000
		Significance (2-tailed)	,002	.
		Df	57	0

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21,798	,203		107,377	,000
	Jumlah PKP	,002	,000	,586	6,187	,000
	Surat Paksa	-,028	,009	-,300	-3,167	,002

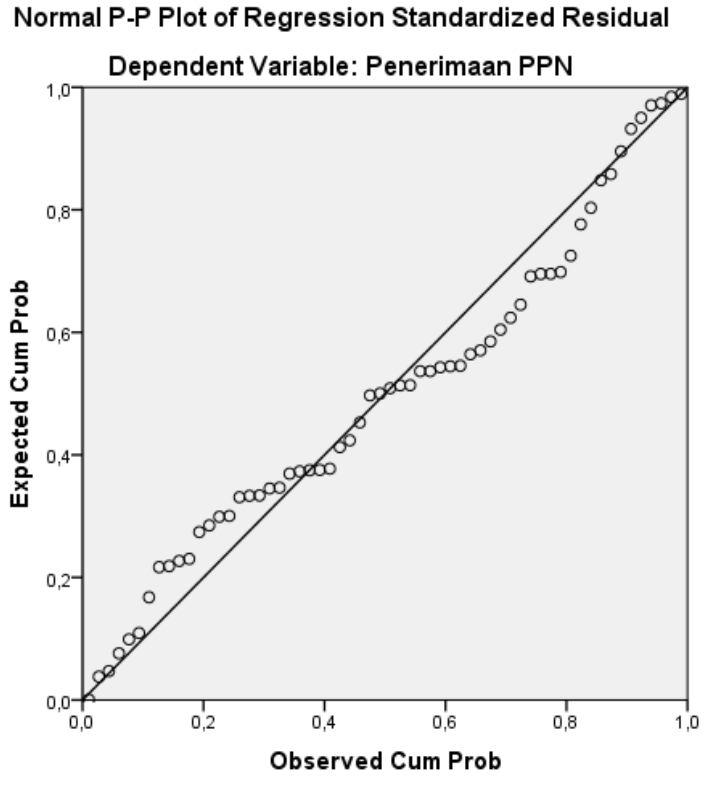
a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Model Summary[b]

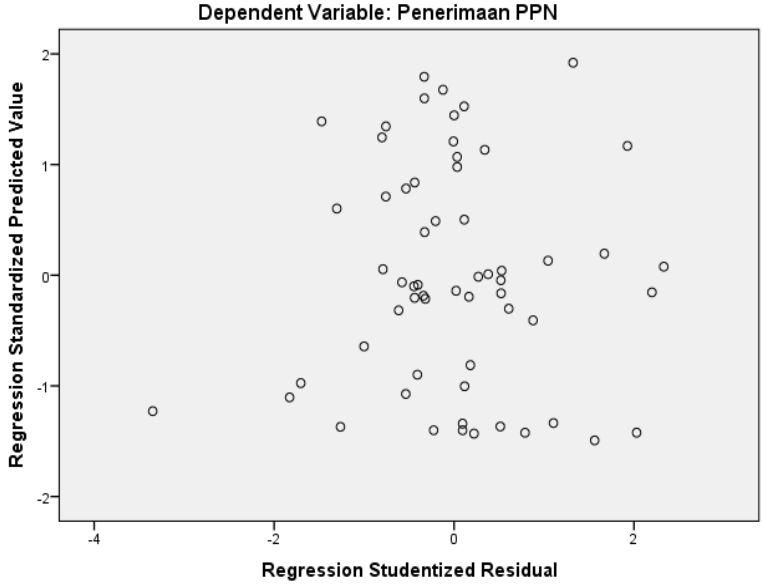
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,769[a]	,592	,578	,42272	1,682

a. Predictors: (Constant), Surat Paksa, Jumlah PKP

b. Dependent Variable: Penerimaan PPN



Scatterplot



\